

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2011 kabupaten Kulonprogo merupakan Kabupaten termiskin di antara 5 kabupaten/kota yang ada di provinsi DIY. ketika Pak Hasto Wardoyo menjadi Bupati Kabupaten Kulon Progo tingkat kemiskinan sebesar 23,62%, kemudian berkurang sedikit menjadi 23,32% (BPS D.I.Yogyakarta) . Bisa dikatakan seperempat dari penduduk Kulon Progo adalah masyarakat miskin. Kedua, Di Kulon Progo terdapat empat mega proyek, diantaranya adalah pembangunan bandara internasional, pengolahan bijih besi, pembangunan pelabuhan perikanan, kawasan industri yang terletak di Nanggulan dan Sentolo, serta pembangunan kawasan wisata. Ketiga, fenomena nasional dengan adanya global trade (perdagangan bebas) yang saat ini Indonesia berada di MEA (masyarakat ekonomi ASEAN). Dari hal seperti ini, maka dalam upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan daerah termiskin di DIY dalam rangka persiapan menghadapi megaproyek dan MEA masyarakat Kulon Progo dituntut untuk bisa menangkap peluang usaha dan peluang kerja tetapi di satu sisi kondisi masyarakat itu miskin, ditambah dengan kultur yang ada bukanlah kultur wirausaha melainkan kultur agraris. Presentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :

Tabel 1.1 Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2015.

No.	<u>Kabupaten / kota</u>	<u>Presentase Penduduk Miskin (persen)</u>				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	D. I. Yogyakarta	16,14	15,88	15,03	14,55	14,91
2.	<u>Kulon Progo</u>	23,62	23,32	21,39	20,64	21,40
3.	<u>Bantul</u>	17,28	16,97	16,48	15,89	16,33
4.	<u>Gunung Kidul</u>	23,03	22,72	21,70	20,83	21,73
5.	<u>Sleman</u>	10,61	10,44	9,68	9,50	9,46
6.	Yogyakarta	9,62	9,38	8, 82	8,67	8,75

(Sumber: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017)

Berdasarkan data diatas tingakt kemiskinan di kabupaten kulon Progo terbilang cukup tinggi. Oleh karena itu pemerinah kabupaten kulon progo melakukan pengembangan di sektor IKM dan UKM. Pengembangan dan pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki peranan yang sangat sentral dalam upaya untuk memulihkan perekonomian nasional, karena pada saat terjadi krisis ekonomi, industri kecil merupakan satu-satunya penopang perekonomian nasional. Beberapa faktor kendala yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan daya saing produknya, adalah: modal kecil, Sumber Daya Manusia kurang berkualitas, rendahnya kemampuan dan pemahaman

pada sains dan teknologi, manajemen, keterbatasan akses kepada sumber teknologi dan akses pasar.

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo pun juga terus melakukan penyelenggaraan pembangunan yang meliputi berbagai bidang dan sektor, hal ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo lebih mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan peran usaha kecil dan menengah yang bertumpu pada kegiatan agrobisnis. Salah satu bentuk usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan peningkatan dan pemberdayaan usaha-usaha kecil, selain itu karena UMKM di sektor industri merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan sektor industri lainnya di Kabupaten Kulonprogo.

Dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun ekonomi tersebut, Kabupaten Kulonprogo telah merancang sebuah program yang bernama Bela Beli Kulonprogo yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi Kulonprogo. Gerakan Bela Beli Kulonprogo merupakan sebuah kebijakan yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kulonprogo 2011-2016 serta sesuai dengan pasal 5 UU No 25 Tahun 2004. Program Bela-beli kulonprogo merupakan suatu program yang berbasis *collaborative governance* yang dalam pelaksanaannya melibatkan tiga actor yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta yang melalui pendekatan perekonomian pada sektor pemasaran yang di inisiatifkan oleh gubernur.

Dalam pelaksanaan program Bela beli Kulonprogo pemerintah menerapkan program *One village One Product* atau yang lebih sering dikenal dengan OVOP.

Program OVOP ini di gagas oleh Morihiko Hiramatsu di *Oits Prefecture* di Jepang pada tahun 1997. Trobosan OVOP ini dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan sumberdaya manusia di masyarakat desa pada pengelolaan prodak tertentu untuk meningkatkan perekonomian pedesaan melalui pengelolaan prodak lokal guna meningkatkan pendapatan masyarkatnya pada *level grassroot* serta untuk mengangkat prodak lokal (Burhanuddin,2005:144). Bapak Hasto wardoyo menganggap program ini sangat sesuai di terapkan di Kabupaten kulon progo karena latar belakang kultur dan sosial masyarakat kabupaten kulon progo yaitu bertani.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia program *one village one product* atau lebih dikenal dengan OVOP sudah dirilis sejak tahun 2008 sebagai salah satu pogram prioritas untuk pembangunan nasional dimana, hal tersebut didukung dengan adanya landasan-landasan hukum dalam pelaksanaan OVOP di Indonesia. Landaan-landasan hukum tersebut sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Percepatan Sektor Riil dan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (yang mengamanatkan pengembangan sentra melalui Pendekatan *One Village One Product (OVOP)* (Rudi,2014).

2. Undang-undang nomer 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Undang-undang nomer 25 tahun 1992 tentang pengkoprasian.

Tujuan dari adanya program OVOP di Indonesia adalah untuk menggali potensi-potensi lokal didaerah, kerena dengan hal tersebut maka akan mendorong masyarakatnya menggali serta menciptakan prodak-prodak baru yang memiliki ciri khas dan kearifan lokal di masingmasing daerahnya. Implementasi program OVOP ini sudah diinisiasikan di 73 lokasi di seluruh Indonesia yang dibina dan dikembangkan oleh 27 koprasasi melalui 13 provinsi melalui konsep OVOP. Dari beberapa macam produk asli Kabupaen kulon progo yang ada di dalam program bela-beli kulon progo, Gula merah dan gula semut menjadi produk unggulan dari program Bela-beli Kulon Progo. Hal ini dikarenakan pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian penduduk di kabupaten Kulonprogo.

Peran sektor pertanian antara lain menyerap tenaga kerja, menambah devisa negara, mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, dan pasar bagi sektor industri. Industrialisasi pertanian juga dikenal dengan nama Agroindustri. Agroindustri adalah kegiatan berupa pengolahan hasil pertanian

yang melibatkan faktor penyedia alat dan jasa dalam proses kegiatan tersebut untuk menghasilkan produk pertanian yang mempunyai nilai tambah dan berdaya saing. Dimana agroindustri bisa menjadi solusi untuk meningkatkan perokonomian masyarakat pedesaan. Keberadaan agroindustri di pedesaan diharapkan dapat meningkatkan permintaan terhadap komoditas pertanian, karena sektor agroindustri sangat berperan dalam mengubah produk pertanian menjadi barang yang lebih bermanfaat (Soekartawi, 2003).

Agroindutri gula semut merupakan bentuk inovasi olahan hasil pertanian yang dahulu merupakan Gula merah. Hasil olahan gula merah menjadi gula semut dinilai lebih higiens dan ekonomis sehingga dapat lebih mudah dipasarkan diluar daerah kabupaten Kulonprogo. Selain itu permintaan ekspor gula semut di pasar internasional terbilang cukup tinggi sehingga agroindustry gula semut dapat di kembangkan lebih maju lagi karena memiliki potensi yg besar untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat d kabupaten Kulon progo. Agroindustri gula merah sendiri sudah berlangsung sejak tahun 1985 atau sudah 42 tahun berjalan. Produksi gula merah di desa Hargorejo bisa dikatakan banyak dan produktif. Dikatakan banyak karena banyak dari masyarakat mencari sesuap nasi dengan memproduksi gula merah. Kemudian dikatakan produktif karena jumlah produksi gula merah di Hargorejo bisa terbilang *continue* atau terus menerus memproduksi setiap harinya.

Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan dalam penerapan program tersebut masih menemui kendala di antaranya tingkat angka kecelakaan kerja yang tinggi dan kurang minatnya para generasi muda daerah untuk terjun menjadi penderes gula kelapa. Menurut Bapak Hastowardoyo selaku Bupati di Kabupaten Kulon Progo Tingginya angka kecelakaan kerja pada penderes gula kelapa di kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 mencapai 20 orang korban. Di desa Hargorejo produksi gula semut merupakan yang terendah diantara Desa lain yang terdapat di Kecamatan Kokap kabupaten Kulon Progo. Selain itu Pemerintah kabupaten Kulon Progo yang telah melakukan intensifikasi dalam pengembangan agroindustri melalui program OVOP masih menemui kendala di lapangan yang berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo perolehan pendapatan gula kelapa di kecamatan kokap sempat mengalami penurunan yaitu dari 4.685.310 (Kg) pada tahun 2015 turun menjadi 4.490.640 (Kg) di tahun 2016 (BPS, D.I.Yogyakarta 2016). penurunan hasil gula kelapa ini tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi penurunan produksi gula semut karena gula jawa merupakan bahan baku utama dalam industri gula semut.

. Pemerintah tentunya telah menangani permasalahan tersebut melalui pengembangan agroindustri secara *Collaborative governance* yang melibatkan pihak pemerintah sendiri, swasta, dan masyarakat . Hanya saja pendekatan yang dipilih pemerintah daerah lebih kepada pendekatan kuratif yang dimana seperti contoh kasusnya regulasi yang dimaksud adalah upaya

bantuan kuartif terhadap penderes yang mengalami kecelakaan kerja. Kebijakan kuratif yang digunakan dengan mengaplikasikan bantuan sosial bagi para penderes yang mengalami kecelakaan dan sosialisasi terhadap alat bantu produksi yang dinilai kurang memberikan motivasi dan juga penguatan terhadap perilaku kerja. Berdasarkan latar belakang diatas, diperlukanya langkah antara Pemerintah, BUMDes, dan Pihak Swasta dalam pengambilan strategi . Dengan demikian penulisan skripsi ini secara lengkapnya ditulis dengan judul “Collaborative Governance dalam upaya Pengembangan Agroindustri Gula Semut” (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hargorejo, Kecamatan kokap, Kabupaten *Kulonprogo*) ”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu :

- 1) Bagaimana peran *Collaborative governance* dalam upaya pengembangan Industri gula semut di Desa Hrgorejo, Kecamatan Kokap, kabupaten Kulonprogo ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran “Collaborative governance” dalam upaya pengembangan Industri gula semut di Desa hargorejo .

D. MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pemerintahan dan menambah bahan kajian dalam studi ilmu pemerintahan terkait dengan peran *Collaborative governance* dalam upaya pengembangan agroindustri gula semut

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai peran *collaborative governance* dalam upaya pengembangan produk unggulan daerah oleh pemerintah kabupaten kulonprogo terkait program utama dalam pengembangan agroindustri gula semut, Serta dapat menjadi ilmu pengetahuan alam dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan sumber daya alam secara efisien modern dan berkelanjutan .

E. TINJAUAN PUSTAKA

Junaedi (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Collaborative Governance Dalam Upaya Penyelesaian Krisis Listrik di Kota Tanjungpinang”. Studi ini menjelaskan bahwa Krisis listrik di Kota Tanjungpinang memerlukan banyak pihak untuk mengatasinya. Seharusnya saat ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Perseroan Terbatas

Perusahaan Listrik Milik Negara (PT PLN) harus melakukan Colaborasi dalam upaya menyelesaikan Krisis Listrik yang melanda hampir di seluruh daerah termasuk Kota Tanjungpinang. Perlu pengawalan serius dalam mengatasi krisis listrik krisis listrik yang semakin parah ini dapat di selesaikan. Collaborative Governance sangat di butuhkan dalam upaya menyelesaikannya.

Kolaborasi dalam permasalahan ini memastikan bahwa berbagai kepentingan yang di wakili atas dasar sanling ketergantungan para Stakeholder Tujuan collaborative governance Upaya Menyelesaikan Krisis listrik di Kota Tanjungpinang. Dalam pembahasan ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Informen dalam penelitian ini adalah Walikota Tanjungpinang, BAPPEDA, Ketua DPRD kota Tanjungpinang, Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Manager Aerial Perusahaan Listrik Milik Negara (PLN)Tanjungpinang.

Teknik analisis data yang di gunakan Analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di analisa dalam mengatasi permasalahan listrik sudah di upayakan dengan collaborative governance, Pemerintah selama ini ikut membantu Perusahaan Listrik Negara menyelesaikan krisis listrik di kota Tanjungpinang. Namun terkendala di kewenangan di mana hirarki organisasi Perusahaan Listrik Negara yang keputusan sepenuhnya di tentukan Pusat. Perusahaan listrik Negara belum bisa mengatasi masalah listrik karena pembangunan tansmisi batam-bintan mengalami kendala, permasalahan hutan lindung, dan pembebasan lahan.

Yasmin Chairunisa Muchtar dan Inneke Qamariah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Internationalization Preparation of Small Medium Enterprises (SMEs) in Medan”, hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang harus disiapkan untuk internasionalisasi UKM adalah keunikan produk dan tingginya permintaan pasar internasional terhadap produk dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk produksi dan pemasaran agar produk sesuai dengan standar internasional.

Untuk mendukung proses internasionalisasi maka diperlukan kolaborasi dan sinergi yang baik antar 5 pemangku kepentingan terkait sebagai adaptasi dari model Penta Helix yaitu akademisi atau peneliti, sektor pemerintah dalam bidang industri dan perdagangan, pemilik usaha, media dan komunitas. Namun masih terdapat beberapa hambatan dalam proses persiapan internasionalisasi UKM yaitu hanya beberapa pelaku UKM yang tertarik memperluas usahanya ke luar negeri, karena beberapa pelaku UKM yang lain sudah puas dengan keadaan yang ada, kurang memiliki orientasi kewirausahaan, sumber daya manusia yang masih membutuhkan pelatihan dan kurangnya melek terhadap perkembangan teknologi.

Sri hery susilowati (2016), dalam “ Fenomena Penuaan Petani dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda serta Implikasinya bagi Kebijakan Pemerintahan”. Dalam penelitiannya dijelaskan tentang Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki komitmen membangun sektor pertanian merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan pertanian

berkelanjutan. Namun, pembangunan pertanian menghadapi permasalahan cukup serius, yaitu jumlah petani muda terus mengalami penurunan, baik secara absolut maupun relatif, sementara petani usia tua semakin meningkat. Tujuan makalah ini adalah melakukan review tentang perubahan struktural tenaga kerja pertanian dilihat dari fenomena aging farmer dan menurunnya jumlah tenaga kerja usia muda sektor pertanian di Indonesia dan di berbagai negara lainnya, mengidentifikasi berbagai faktor penyebab perubahan tersebut, serta kebijakan yang diperlukan untuk mendukung tenaga kerja muda masuk ke sektor pertanian.

F. LANDASAN TEORI

1. *Collaborative Governace*

Menurut Ansell and Gash (Lestari, 2014), *collaborative governance* merupakan salah satu tipe governance dimana aktor publik dan privat bekerja secara bersama dengan cara khusus menggunakan proses tertentu untuk menetapkan hukum dan aturan untuk menentukan publik yang baik. Kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara bekerjasama, berinteraksi, maupun berkompromi dengan beberapa pihak baik individu, lembaga, serta pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung (Sulistyoningsih, 2013). Kolaborasi merupakan suatu respon dari organisasi atau institusi terkait dengan perubahan-perubahan disekitar lingkungan institusi. Seperti halnya isu-isu publik yang semakin

meluas dan keluar dari batas-batas kenormalan. Banyak aktor yang terlibat dalam pembuatan keputusan, sedangkan kemampuan pemerintah daerah, kota, dan pemerintah pusat memiliki keterbatasan. Institusi diluar pemerintah semakin meningkat serta masyarakat yang cenderung semakin kritis menuntut pemerintah untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungan eksternal. Sehingga pemerintah dituntut untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta dan masyarakat yang berkepentingan dalam kebijakan-kebijakan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat (Nurchayono, 2015).

Kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat memberikan solusi yang memadai untuk isu-isu kompleks. Pengembangan Agroindustri gula semut merupakan salah satu isu yang kompleks karena pemerintah tidak bisa sendirian dalam mengembangkan Agroindustri gula semut. harus ada dukungan dari beberapa pihak mulai dari proses bisnis, bagian pelaksanaan hingga pemasaran untuk mendukung kemajuan Agroindustri tersebut secara optimal. Dalam pengembangan Agro industri gula semut di desa Hargorejo, Pemerintah telah berkolaborasi dengan beberapa pemangku kepentingan, yaitu dengan akademisi, bisnis, komunitas dan media.

Sedangkan menurut Janin O'Flynn dan Wanna (2008) bahwa mengukur tahapan didalam *collaborative governance* bisa dilakukan dari tahapan Membangun visi bersama (*shared vision*) adanya visi yang jelas antar setiap organisasi dan kelompok masyarakat, Partisipasi (*Participative*) adanya keterliatan *stakeholder* dalam pengelolaan, Jejaring (*Network*) adanya relasi

dan jaringan yang kuat antar *stakeholder* , Kemitraan (*Partnership*) terjalinnya kemitraan antara stakeholder yang terlibat dalam urusan.

Menurut Sullivan dan Skelcher (Zaenuri, 2016), terdapat faktor kunci untuk membangun kapasitas kolaborasi antara lain: komunikator yang terampil dan memainkan peran penting dalam membangun hubungan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama, dan membuat *link* yang kuat antara para pemangku kepentingan yang didasarkan pada kapasitas individu dan kapasitas organisasi. Selain itu, terdapat enam kriteria yang penting dalam *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash, (Sulistyoningsing, 2013), yaitu :

- a) Forum dimana forum diprakarsai oleh badan-badan publik atau lembaga.
- b) Peserta forum termasuk pelaku non-negara (lembaga privat).
- c) Peserta terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan serta tidak hanya berkonsultasi dengan lembaga publik.
- d) Forum terjadi secara resmi, terorganisir, dan bertemu secara kolektif.
- e) Forum memiliki tujuan untuk membuat keputusan dengan kesepakatan bersama atau konsensus (bahkan jika tidak mencapai konsensus pada prakteknya).
- f) Kebijakan berfokus pada kebijakan publik atau publik manajemen.

Terdapat beberapa tahapan untuk mencapai kolaborasi antar *stakeholder*. Menurut Roberts (Zaenuri, 2018), kolaborasi merupakan tahapan

terakhir dari jejaring yang tidak formal. Tahap awal adalah jejaring yang bersifat tidak formal yang selanjutnya berkembang melalui koordinasi, kooperasi hingga akhirnya sampai pada kolaborasi. Jejaring bersifat tidak formal, hanya sekedar bertukar informasi untuk saling menguntungkan, tidak ada saling bertukar sumber daya yang diperlukan. Sedangkan kolaborasi sudah sampai pada tahap peningkatan kapasitas organisasi secara formal untuk mencapai tujuan yang sama, kerjasama sudah terbagi mengenai sumberdaya dalam menanggung risiko, tanggung jawab, dan manfaat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1.2.
Matrix of Strategies for Working Together

<i>Type of relationship</i>	<i>Definition</i>	<i>Relationship</i>	<i>Characteristic</i>	<i>Resources</i>
<i>Network ing</i>	<i>Exchanging information for mutual benefit</i>	<i>Informal</i>	<i>Minimal time commitment; Limited level of trust; no necessity to share turf; Information exchange is the primary focus</i>	<i>No mutual sharing of resources necessary</i>
<i>Coordinating</i>	<i>Exchanging information for mutual benefit; Altering activities to achieve a common purpose</i>	<i>Formal</i>	<i>Moderate time commitments; Moderate levels of trust; No necessity to share turf; Making access to services or resources more user friendly is the primary focus</i>	<i>No or minimal mutual sharing of resources necessary</i>
<i>Cooperating</i>	<i>Exchanging information for mutual benefit; Altering activities and sharing resources to</i>	<i>Formal</i>	<i>Substantial time commitments; High levels of trust; Significant access to each other's turf;</i>	<i>Moderate to extensive mutual sharing or resources and some</i>

	<i>achieve a common purpose</i>		<i>Sharing of resources to achieve a common purpose is the primary focus</i>	<i>sharing of risks, responsibilities, and rewards</i>
<i>Collabrating</i>	<i>Exchangng information for mutual benefit; Altering activities, sharing resources and enhancing the capacity of another to achieve a common purpose</i>	<i>Formal</i>	<i>Extensive time commitments; Very high level of trust; Extensive areas of common turf; Enhancing each other's capacity to achieve a common purpose is the primary focus</i>	<i>Full sharing of resources and full sharing of risks, responsibilities; and rewards</i>

Sumber : Roberts (Zaenuri, 2018)

Sementara itu, Sullivan dan Skelcher menggambarkan beberapa hambatan dalam kolaborasi, seperti aturan formal yang berbeda-beda, norma-norma informal, dan sumber daya yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan, hal ini dapat merusak kapasitas untuk kolaborasi karena menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan dan konflik bisa terjadi (Zaenuri, 2016). Syarat dasar agar *collaborative governance* dapat terwujud adalah dengan adanya visi bersama yang diyakini sebagai gambaran masa depan oleh pemangku kepentingan, dengan adanya visi yang sama maka setiap komponen memungkinkan untuk berpartisipasi dalam urusan yang disepakati bersama.

Menurut Shergold (Zaenuri, 2018) konsep *collaborative governance* merupakan suatu proses yang bersifat transformatif mulai dari hubungan yang bersifat komando hingga sampai interaksi yang bercirikan kolaborasi. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan proses tranformasi kolaborasi :

Tabel 1.3.
Proses Transformasi Kolaborasi

<i>Command</i>	<i>The process of centralized control - with clear lines of hierarchical authority.</i>
<i>Coordination</i>	<i>The process of collective decision making – imposed on participating institutions.</i>
<i>Cooperation</i>	<i>The process of sharing ideas and resources – for mutual benefit.</i>
<i>Collaboration</i>	<i>The process of shared creation – brokered between autonomous institutions</i>

Sumber : Shergold (Zaenuri, 2018)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada mulanya kolaborasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan yang lain bersifat komando, dimana pada tahapan ini masih bersifat hirarki dan adanya kontrol yang kuat dari pemerintah, pemangku kepentingan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pada tahap berikutnya bersifat koordinasi, dimana antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lain sudah terjadi proses pengambilan keputusan yang bersifat kolektif. Kemudian dari hubungan yang bersifat kolektif tersebut meningkat menjadi hubungan yang bersifat kooperatif, dimana dalam hubungan yang bersifat kooperatif ini sudah terjadi berbagi ide dan sumberdaya untuk memperoleh manfaat bersama. Dan akhirnya di tahap akhir dari hubungan tersebut bersifat kolaboratif, di dalam tahapan akhir ini sudah terjadi hubungan sampai pada tahap berbagi kreasi yang diwujudkan dalam bentuk lembaga yang bersifat permanen dan otonom.

2. Pengembangan Agroindustri

Menurut Soeharjo (1991), Agroindustri merupakan pengolahan hasil pertanian dan karena itu agroindustri merupakan bagian dari enam subsistem agribisnis yang disepakati selama ini yaitu subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan, usaha tani, pengolahan hasil (agroindustri), pemasaran, sarana dan pembinaan.

Namun Menurut Mosher (1966), pertanian dan agroindustri dijelaskan lebih detail menurut Mosher pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas, yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya. Kemudian secara umum agar pengembangan agroindustri dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan beberapa pra-syarat, sebagai pra-kondisi bagi pengembangannya. Jika dilihat lagi apa yang diungkapkan Mosher dalam literatur klasik "*Getting Agriculture Moving*", maka apa yang dimaksudkannya sebagai syarat pokok dan syarat pelancar, merupakan salah satu syarat keharusan bagi pengembangan agroindustri di suatu wilayah.

Syarat pokok pembangunan pertanian meliputi beberapa persyaratan seperti : adanya pasar untuk hasil-hasil usahatani, teknologi yang senantiasa berkembang, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal, adanya perangsang produksi bagi petani, dan tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu.

Sedangkan untuk syarat pelancar pembangunan pertanian meliputi beberapa poin yaitu : pendidikan pembangunan, kredit produksi, kegiatan gotong royong petani, perbaikan dan perluasan tanah pertanian, dan perencanaan nasional pembangunan pertanian.

Sedangkan menurut Menurut Van Aarsten(1953), agriculture adalah digunakannya kegiatan manusia yang bertujuan memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau hewan tersebut. Dari batasan tersebut jelas bahwa untuk dapat disebut sebagai pertanian perlu dipenuhi beberapa persyaratan:

- a) Adanya alam beserta isinya antara lain tanah sebagai tempat kegiatan, dan tumbuhan serta hewan sebagai obyek kegiatan.
- b) adanya kegiatan manusia dalam menyempurnakan segala sesuatu yang telah diberikan oleh alam dan atau Yang Maha Kuasa untuk kepentingan/ kelangsungan hidup manusia melalui dua golongan yaitu tumbuhan/tanaman dan hewan/ternak serta ikan.
- c) ada usaha manusia untuk mendapatkan produk/hasil ekonomis yang lebih besar daripada sebelum adanya kegiatan manusia.

Pengembangan industri pertanian memiliki potensi yang sangat besar Dengan tersedianya lahan dan jumlah tenaga kerja yang besar, diharapkan sektor ini dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satu

tanaman pertanian yang mudah dibudidayakan di Indonesia adalah pohon kelapa. Kelapa merupakan tanaman perkebunan/industri berupa pohon batang lurus dari *famili Palmae*. Dengan di kembangkannya industri gula semut diharapkan akan menambahkan pendapatan daerah dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam pengembangan Industri diperlukan sebuah perencanaan. Perencanaan itu dimaksudkan agar pengembangan industri dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan berhasil mencapai sasaran yang dikehendaki. Pengembangan industry yang tidak direncanakan akan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial dan ekonomi seperti hialngnya transparasi dalam pengelolalan industry dan hialangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pengembangan Industri gula semut tidak dapat berdiri sendiri tetapi berkaitan erat dengan sektor ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat, sehingga perlu memperhatikan dalam segala macam segi tanpa terkecuali.

G. DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual merupakan penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas (Chonrmain, 2008:36). Dapat diambil kesimpulan yaitu menyatukan pemahaman mengenai pengertian yang menjadi pokok perhatian untuk menghindari kesalah pahaman dalam

memahami istilah atau pengertian dalam penelitian Adapun batasan konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Collaborative Government

Collaborative Government adalah kerjasama antara publik dan privat yang berkemungkinan aktifitas yang dilakukan individu atau kelompok organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang atau fungsi tertentu yang diakui keberadaannya dalam kelompok sosial demi tercapainya tujuan yang di tentukan.

2) Pengembangan Agroindustri

Pengembangan Agroindustri adalah merupakan upaya pemanfaatan sumber daya tanah dan air, serta hayati secara produktif dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, bahan baku industri, ekspor dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

H. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cam memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut (Nazir, 1985:30). Adapun definisi operasional dalam penelitian adalah Dalam penelitian ini, definisi operasional untuk

mengukur skala kolaborasi dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam collaborative governance dalam Pengembangan Agroindustri Gula semut antar stakeholders (pemerintah, swasta, dan masyarakat), dalam hal ini peneliti menggunakan dari teori yang dikemukakan Janin O’Flynn dan John Wanna yaitu:

Tabel 1.3.

Definisi Collaborative governance menurut Janin O’Flynn dan John Wanna

No	Variabel	Indikator
1.	Membangun visi bersama <i>(shared vision)</i>	<p>a) Pada setiap organisasi atau kelompok masyarakat memiliki kepentingan yang sama.</p> <p>b) Adanya tujuan bersama yang dilandasi visi yang jelas untuk dimasa yang akan datang.</p>
2.	Partisipasi <i>(Participative)</i>	<p>a) Adanya keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan Agroindustri gula semut.</p>

		<p>b) Adanya struktur yang jelas antar <i>stakeholder</i>.</p> <p>c) Partisipasi aktif sebagai syarat mutlak agar proses <i>governance</i> dapat berlangsung.</p> <p>d) Adanya visi bersama diantara <i>stakeholder</i> maka setiap komponen akan melakukan partisipasi sucara sukarela tanpa diperintah.</p>
3.	Jejaring (<i>Network</i>)	<p>a) Adanya partisipasi yang aktif diantara <i>stakeholder</i></p> <p>b) Terjadinya relasi yang baik antar <i>stakeholder</i></p> <p>c) Adanya jejaring yang kuat antar <i>stakeholder</i>.</p> <p>d) Adanya Jejaring yang telah diakui secara luas baik oleh akademisi dan praktisi sebagai bentuk penting dari</p>

		pemerintahan multi-organisasi.
4.	Kemitraan (<i>Partnership</i>)	<p>a) Terjalannya kemitraan antara stakeholder yang terlibat dalam urusan Agroindustri gula semut.</p> <p>b) Adanya konsep kolaborasi yang menunjukkan adanya skala dan tingkat intensitas.</p> <p>c) Terjalannya partisipasi yang memunculkan kemitraan.</p>

I. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif desk adalah pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Nawawi, 1990:63). Jadi dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan/menggambarkan bagaimana Strategi BUMDes Hargorejo dalam Pengembangan Gula semut di desa Hrgorejo.

2. Lokasi dan Informan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Collaboarive Governance dalam upaya Pengembangan Agrodustri Gula Semut Pada Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Sleman”. Hal ini dikarenakan menjadi lokasi penelitian selain itu di lokasi tersebut menjadi salah satu contoh keberhasilan masyarakat lokal sekitar dalam mengelola potensi sumber daya alam sekitar menjadi salah satu pemasok utama industri olahan gula kelapa yang cukup terkenal di kabupaten Kulonprogo. Oleh karena itu peneliti tertarik mengambiul penelitian di lokasi tersebut, dan menjadi tempat peneliti mengambil data dalam kaitan memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Dipilihnya Desa Hargorejo sebagai lokasi penelitian dikarenakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a) Penelitian ini difokuskan kepada strategi masyarakat dalam pengembangan Industri gula semut , dikarenakan BUMDes hanya menjembatani masyarakat supaya peran masyarakat dalam pengembangan Industri itu sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan.
- b) Narasumber atau informan di dalam penelitian ini maka akan banyak kita temukan di dalam kawasan Desa Hargorejo
- c) Karena desa Hargorejo merupakan salah satu desa yang cukup terkenal dalam hal pemasok utama komoditas gula semut di kabupaten kulon progo.

2. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2014:186). Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan pewawancara.

b) Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan mencatat dan mengambil dari sumber-sumber tertulis yang berupa

arsip, laporan, dan dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini (Lestari, 2014).

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini Analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan secara kualitatif. Jadi dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana proses collaborative government dalam upaya Pengembangan Industri gula semut di desa Hargorejo.

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions).

a) Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b) Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2007: 16). Menurut Mantja (dalam Harsono, 2008: 169), reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

c) Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan (Miles dan Huberman, 2007: 84). Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008: 169) menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

d) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh (Miles dan Huberman, 2007: 18). Kesimpulan kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun

pencatatan, polapola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi (Harsono, 2008: 169).